

OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM

Oleh:

Roida Hutabalian
hutabalianroida55@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Arman Koedoeboen
koedoeboenarman@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Ike Trisnawati
Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat sentral kepada pembangunan pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Seperti yang terjadi di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan kampung di wilayah distrik Skanto menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan distrik juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Distrik Skanto sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan kampung.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Distrik

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemakmuran rakyat, kesehatan dan pendidikan yang tinggi, sehingga memungkinkan mutu kehidupan kenegaraan meningkat, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi masyarakat secara efektif dan efisien. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UUD Tahun 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan.

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat sentral kepada pembangunan

pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan.

Pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh adanya partisipasi masyarakat. Segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat, karena masyarakatlah yang dapat mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya.¹ Sesuai dengan hal tersebut diatas, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan distrik sangat diperlukan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya akan

¹ Rohmad, Zaini 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Ombak, Yogyakarta. hlm 67

menimbulkan kerjasama yang baik untuk memajukan daerahnya.

Seperti yang terjadi di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan kampung di wilayah distrik Skanto menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan distrik juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Distrik Skanto sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan kampung. Dari kondisi obyektif di Kabupaten Keerom secara khusus di distrik Skanto, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan belum dapat dibangkitkan secara nyata sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan kampung. Masyarakat bersikap pasif seolah-olah masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan pembangunan kampung hanya tanggung jawab kepala Kampung semata.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Distrik Skanto Kabupaten Keerom. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses partisipasi masyarakat.

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 Tentang Kecamatan/Distrik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks, hasil penelitian, jurnal hukum, koran, pendapat para sarjana dan laporan yang terkait dengan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan distrik.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan pendapat para ahli yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan dari hal yang

sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Distrik Skanto Kabupaten Keerom

Pembangunan menjadi hal yang esensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, termasuk pelaksanaannya di Distrik Skanto. Dengan adanya berbagai kebutuhan masyarakat maka perencanaan, pembangunan, peningkatan serta

pendayagunaan kelembagaan kampung yang proaktif dan responsif sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kampung di Distrik Skanto.²

Distrik Skanto merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah, distrik masuk dalam daftar sebagai organisasi perangkat daerah dan dijelaskan bahwa distrik dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan.

Pemerintahan distrik dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan distrik yang disebut dengan kepala Distrik yang berada di bawah dan bertanggung kepada bupati melalui

sekretaris daerah.³ Sebagai pimpinan pemerintahan di wilayah pemerintahan distrik, maka Kepala Distrik mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Tujuan pembangunan distrik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat distrik dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Cakupan dari kegiatan pembangunan distrik ini antara lain: Pemenuhan kebutuhan dasar; Pembangunan sarana dan prasarana kampung; Pengembangan potensi ekonomi lokal; Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk

² Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang. hlm 25

³ Dadang Julianto, 2017, dalam Purwo Santoso, *Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta. hlm 37

memajukan masyarakat. Salah satu pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan warga atau masyarakat dalam segenap proses pembangunan, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pemanfaatan hasil-hasilnya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat distrik. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik.

Apapun bentuk partisipasinya, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam

sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Distrik Skanto, meliputi:

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.⁴ Dengan demikian perencanaan pembangunan harus berpedoman pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam

⁴ Katz, Saul M, 1992, *Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional: suatu arahan praktis Edisi Cet. 1*, Rineka Cipta, Jakarta.

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.⁵

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya sesuatu yang merupakan luaran dari partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera. Masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

Keterlibatan masyarakat dalam hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Distrik di Distrik

Skanto dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya adalah ikut dalam kegiatan perencanaan musyawarah pembangunan kampung (musrenbang kampung).

Proses optimalisasi partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Distrik Skanto dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat RT kemudian musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kampung, dan selanjutnya musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Distrik. Dalam musyawarah tingkat Kampung tersebut

Musrenbang kampung merupakan forum tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Kampung untuk merancang program-program pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Program pembangunan yang akan dicanangkan mengacu pada RPJM Kampung, Kabupaten dan jumlah APBKam dimana salah

⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

satu sumber dari APBKam tersebut berasal dari bantuan keuangan Kabupaten yang biasa disebut Alokasi Dana Kampung. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis.

Hasil program yang dirumuskan dalam Musrenbang tingkat kampung tersebut yang akan dibahas pada Musrenbang distrik untuk diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan anggaran yang ada. Musrenbang Distrik merupakan musyawarah yang dilakukan ditingkat distrik yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat wilayah Distrik Skanto. Musrenbang di tingkat distrik akan membahas hasil musrenbang yang telah diputuskan tingkat masing-masing kampung yang ada di wilayah Distrik Skanto.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hubungan antara perencanaan dan pelaksanaannya cukup erat. Masalah

pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana, hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran dari rencana itu. Oleh sebab itu, rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. Pembangunan meliputi pengaruh daya dan dana administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program pembangunan. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemanfaatan dana kampung di Distrik Skanto. Selain itu proses partisipasi dapat dilihat dan diukur dari keaktifan masyarakat dalam keikutsertaan melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan yang berupa pembuatan pemerataan jalan, pembuatan jalan ke lahan pertanian, serta infrastruktur yang berupa kegiatan pembuatan pembangunan untuk menunjang setiap program pembangunan di Distrik Skanto yaitu dengan memberikan kontribusi tenaga dan

keahlian yaitu masyarakat ikut berpartisipasi di dalam pekerjaan pembuatan jalan ke lahan pertanian dan pembangunan rumah bagi warga yang tidak mampu.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di distrik Skanto pada umumnya dan secara khusus di Kampung Naramben dengan cara gotong royong tidak berjalan dengan baik. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat minim karena masyarakat kurang peduli dan bersikap pasif. Masyarakat hanya mempercayakan pelaksanaan pembangunan kepada kepala kampung saja dengan alasan dana desa untuk pembangunan kampung sudah ada.

Pada umumnya masyarakat menginginkan pembangunan di dilaksanakan dengan cara padat karya. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga secara gotong royong tidak perlu lagi karena pemerintah kampung dapat memanfaatkan dana desa. Hal ini

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kampung di Distrik Skanto bersikap pasif meskipun dalam tahap perencanaan program tersebut atas kesepakatan bersama. Adapun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan jalan ke ladang, kerja bakti dan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu, menggunakan tukang/ahlinya maupun buruh kasarnya dari masyarakat karena pemerintah kampung memberikan imbalan insentif keuangan berupa gaji sebagai buruh.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Partisipasi Pembangunan tidak hanya pada saat pelaksanaan. Tapi juga perawatan dan pemeliharaan bangunan juga tetap merupakan partisipasi dari pembangunan. Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau

memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya dengan menjaga dan mengamankannya dan mengembangkan.

Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berarti mendukung ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia dan keadilan sosial serta memelihara pembangunan sebagai lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang. Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi bahwa apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut. Manfaat dari hasil pembangunan yang berupa penimbunan jalan kampung, pemerataan jalan dan pembangunan kampung tersebut

adalah masyarakat dapat menjaga lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari pencemaran. Hal ini lebih jauh dari sekedar menerima dan memanfaatkan adalah dengan memelihara hasil pembangunan tersebut sebagai wujud dari kepedulian masyarakat terhadap hasil pembangunan distrik.

Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan hasil pembangunan di Distrik Skanto diberikan langsung kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil terlaksananya pembangunan kampung tersebut. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sangat penting karena masyarakat adalah tujuan utama dari setiap pembangunan maka masyarakat juga harus memelihara dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan tidak begitu peduli

atau antusias pada hal masyarakat sendiri yang menerima manfaat dari pembangunan tersebut.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Distrik Skanto Kabupaten Keerom

Pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di kampung merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan kampung.

Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan di wilayah distrik, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat kampung yang ada di distrik itulah yang menjadi kunci keberhasilannya.

⁶Namun demikian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan. Menurut hemat penulis faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Distrik skanto Kabupaten Keerom, terdiri dari:

a. Faktor internal meliputi :

1) Faktor

Kesadaran/Kemauan

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorong untuk ikut partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka jelas mereka juga akan lebih banyak melibatkan diri

⁶ Made Heny Urmila Dewi, chafid fandeli, M. Baiquni, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, Jurnal Kawistara, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013

didalamnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan warga masyarakat Distrik Skanto agar tujuan pembangunan dapat tercapai di Distrik Skanto, maka warga masyarakat kampung yang ada di Distrik Skanto harus berperan aktif dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan pemeliharaan dari pembangunan.

Menurut bapak Anbiah selaku Kepala Bamuskam kampung Naramben, mengatakan bahwa:

Faktor pertama adalah pemahaman masyarakat bahwa apa yang telah di musyawarakan dan apa yang di rencanakan, yang di putuskan itu berarti di anggap sudah selesai. Jadi pelaksanaan nya di serahkan sepenuhnya kepada kepala kampung. seperti itu. Faktor yang kedua adalah setelah kegiatan, kemudian dana

cair dan tidak semuanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik tetapi ada yang sifatnya pembinaan, pemberdayaan seperti itu sehingga yang lebih dominan ini. Partisipasi masyarakat muncul lebih dominan di mana kegiatan itu di laksanakan misalnya di RT 1 ya lebih dominan di lingkungan itu tidak seluruh masyarakat kampung yang ada yg terlibat seperti itu. Jadi pada intinya di dalam proses awalnya bagus gitu Cuma setelah dalam forum masyarakat lebih mempercayakan kepada kepala kampung untuk pelaksanaannya tetapi meskipun nilai partisipasinya sedikit karna luasnya kampung pengaruh pertama adalah luasnya kampung. Faktor yang ketiga adalah pengaruh profesi masyarakat, dimana masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai petani sehingga masyarakat itu nilai ekonominya masih rendah, kecuali yang partisipasi yang sifatnya umum misalnya kerja bakti tapi kalau partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan seperti jembatan gitu ya cukup 1 orang yang terlibat di lingkungan yang di bangun

jembatan tadi jadi seperti itu biasanya.⁷

2) Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan

tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan yang dilaksanakan itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.

Dilihat dari sisi pendidikan, masyarakat yang ada di Distrik Skanto sebagian besar hanya mengecap pendidikan di tingkat SLTA, hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pulalah tingkat kesadaran untuk melakukan upaya pembangunan, sebaliknya rendahnya tingkat pendidikan seseorang berakibat pada rendahnya kesadaran untuk membangun. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar hasil pembangunan. Melihat

⁷ Anbiah selaku Kepala Bamuskam kampung Naramben, dalam wawancara pada tanggal 26 Agustus 2022

kenyataan ini maka jelas bahwa tingkat pendidikan masyarakat turut berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pembangunan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula partisipasinya dalam pembangunan, khususnya dalam pemberian ide-ide /pikiran.

b. Faktor Eksternal yang meliputi:

1) Kepemimpinan Kepala Distrik:

Program pembangunan adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yaitu kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram, untuk menciptakan hal tersebut sangat diperlukan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Prinsip dari melibatkan masyarakat secara langsung hanya mungkin dicapai jika masyarakat itu sendiri ikut ambil bagian sejak awal mulai dari perencanaan sampai

dengan pelaksanaan dari pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Distrik Skanto tidak datang begitu saja melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat. Karena masyarakat adalah merupakan kumpulan dari beberapa individu yang mempunyai sifat/karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pimpinan dari beberapa pemerintahan kampung, dalam hal ini adalah pemerintah distrik. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika

kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah bertentangan dengan sifat dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya.

Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan diperlukan adanya kepemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat, karena dengan kepemimpinan yang baik oleh pemerintah maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan akan dilaksanakan dengan baik tanpa merasa adanya unsur paksaan atau keterpaksaan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pembangunan di Distrik Skanto Kabupaten Keerom adalah belum terlaksana secara maksimal, karena masyarakat di Distrik Skanto ikut berpartisipasi hanya dalam hal pemberian ide-ide/pemikiran atau masukan pada saat musyawarah pembangunan kampung. Sementara pada saat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirumuskan dan disepakati dalam musyawarah kampung, masyarakat enggan untuk berpartisipasi. Masyarakat hanya mau terlibat dalam pelaksanaan pembangunan apabila mendapat bayaran untuk tenaga mereka dari kepala kampung.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Distrik Skanto Kabupaten Keerom adalah :

a. faktor internal yang meliputi faktor kesadaran/kemauan masyarakat dan faktor pendidikan.

- b. faktor eksternal yang meliputi kepemimpinan kepala Distrik dan perangkatnya.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, Peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di Distrik Skanto kurang optimal, maka perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kampung maupun pemerintah distrik untuk merangsang masyarakat supaya berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di distrik Skanto.
2. Pemerintah Distrik seharusnya dalam menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan sifat dan karakter dari masyarakatnya, sehingga masyarakat tergerak untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di distrik Skanto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dadang Julianto, 2017, dalam Purwo Santoso, "Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa", Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Katz, Saul M, 1992, *Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional: suatu arahan praktis Edisi Cet. 1*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.

Rohmad, Zaini 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Ombak, Yogyakarta.

Jurnal:

Made Heny Urmila Dewi, chafid fandeli, M. Baiquni, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali, Jurnal Kawistara, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa
Peraturan Pemerintah No 18 Tahun
2017 Tentang Distrik

Penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa